



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2025

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
Kabupaten Trenggalek**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala perkenan, petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan lancar. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat berfungsi sebagai Akuntabilitas Kinerja Aparat dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam RPJMD Tahun 2021-2026 utamanya pada urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Disadari bahwa laporan ini tidak terlepas dari kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan kami jadikan sebagai landasan penyempurnaan penyusunan laporan-laporan lainnya di masa mendatang. Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas kami.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Selanjutnya, laporan kinerja sebagaimana dimaksud terdiri dari Laporan Kinerja Intern dan Laporan Kinerja Tahunan. Adapun laporan kinerja tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 24 Perpres dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, sebagai entitas akuntabilitas kinerja maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025. Disamping itu, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengarusutamaan gender maka setiap opd/instansi wajib mengintegrasikannya dalam seluruh siklus pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Sebagai kesimpulan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2025 secara umum telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan termasuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal kegiatan, prosedur sesuai ketentuan, jumlah sasaran termasuk indikator kinerja dilaksanakan sesuai rencana. Sehingga, secara umum dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan pada urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek efektif dan efisien serta akuntabel. Berikut capaian sasaran pada Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	99,63 %	99,89 %	100,26%
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	5,70%	6,87%	120,50%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100%	100%	100%
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	26,36%	26,53%	100,64%
2.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka Penilaian APE	90,00%	80,10%	89,00%
		Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	80,00%	80,10%	100,13%
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,68	98,75	99,07%
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,50 (AA)	90,61 (AA)	100,12 %

Namun, pembangunan di dua urusan sebagaimana dijelaskan di atas ke depan tentunya akan menjumpai berbagai kendala, permasalahan dan hambatan. Menjadi tanggung jawab pemerintah dibantu dengan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Berbagai upaya atau langkah di masa mendatang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah, antara lain dengan

- Pelaksanaan pembangunan pada urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memerlukan dukungan anggaran dari APBD dan APBN.
- Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pengambilan kebijakan untuk memperluas lapangan kerja dengan meningkatkan jumlah angkatan kerja serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial dapat tercapai.
- Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik secara vertikal dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun secara horisontal antara berbagai OPD yang terkait
- Sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan masing-masing unit kerja dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yang diawali dengan pendataan, perencanaan, diikuti pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan acuan dalam perumusan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik terutama bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Trenggalek;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Gambaran Umum.....	2
I.3. Isu – Isu Strategis.....	8
I.4. Landasan Hukum.....	10
I.5. Sistematika penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1. Perencanaan Strategis.....	12
II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	27
II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
II.4. Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	34
III.2. Analisis Capaian Kinerja.....	37
III.3. Realisasi Anggaran.....	68
BAB IV PENUTUP.....	80
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

I.2. Gambaran Umum

Gambaran kondisi sumber daya organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, merupakan pemaparan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 53 orang (data sumber per Desember Tahun 2025) yang terdiri dari PNS sebanyak 28 orang dan PPPK sebanyak 25 orang sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Manusia

Karyawan / karyawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tahun 2025 berjumlah 53 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat		Jumlah		Satuan
	PNS		PPPK		
	Menurut Golongan				
1	Golongan I	-	Golongan I	3	Orang
2	Golongan II	4	Golongan IV	-	Orang
3	Golongan III	21	Golongan V	16	Orang
4	Golongan IV	3	Golongan VI	-	Orang
			Golongan VII	-	Orang
			Golongan IX	6	Orang
	Jumlah Total	28	Jumlah Total	25	Orang
	Menurut Pendidikan				
1	Pasca Sarjana	4	Pasca Sarjana	-	Orang
2	Sarjana	18	Sarjana	6	Orang
3	Diploma (D-III)	3	Diploma (D-III)	-	Orang
4	Diploma (D-IV)	-	Diploma (D-IV)	-	Orang
5	SLTA/SMA/SMK	2	SLTA/SMA/SMK	16	Orang
6	SLTP/SMP	1	SLTP/SMP	-	Orang
7	SD	-	SD	3	Orang
	Jumlah Total	28	Jumlah Total	25	Orang
	Menurut Jenis Kediklatan				
1	Struktural	5	Struktural	-	Orang
2	Fungsional	9	Fungsional	5	Orang
3	Teknis	14	Teknis	20	Orang
	Jumlah Total	28	Jumlah Total	25	Orang
	Menurut Jenis Kelamin				
1	Laki - Laki	17	Laki - Laki	18	Orang
2	Perempuan	11	Perempuan	7	Orang
	Jumlah Total	28	Jumlah Total	25	Orang

Sumber : Dinas Sosial PPPA, Desember 2025

Untuk Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek berdasarkan jenis kelamin yakni laki –laki sebanyak 35 orang, dan perempuan sebanyak 18 orang. Adapun rincian berdasarkan jenis pegawai antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai berikut.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai PNS dan PPPK
pada Dinas Sosial PPPA
Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jenis Pegawai	
		PNS	PPPK
1	Laki-laki	17	18
2	Perempuan	11	7
	Jumlah	35	8

Sumber : Dinas Sosial PPPA Desember Tahun 2025

2. Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3
Barang yang Dikelola
Dinas Sosial PPPA Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Tanah	3
2	Alat-alat Angkutan	36
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1
4.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	583
5.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	87
6.	Alat-alat Laboratorium	10
7.	Alat-alat Persenjataan	3
8.	Alat-alat Komputer	173
9.	Bangunan Gedung	6
10.	Jaringan	2
11.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	2
	Jumlah Total	906

Sumber : Pengelola Barang Dinas Sosial PPPA 2025

I.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja;
- j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;

- k. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

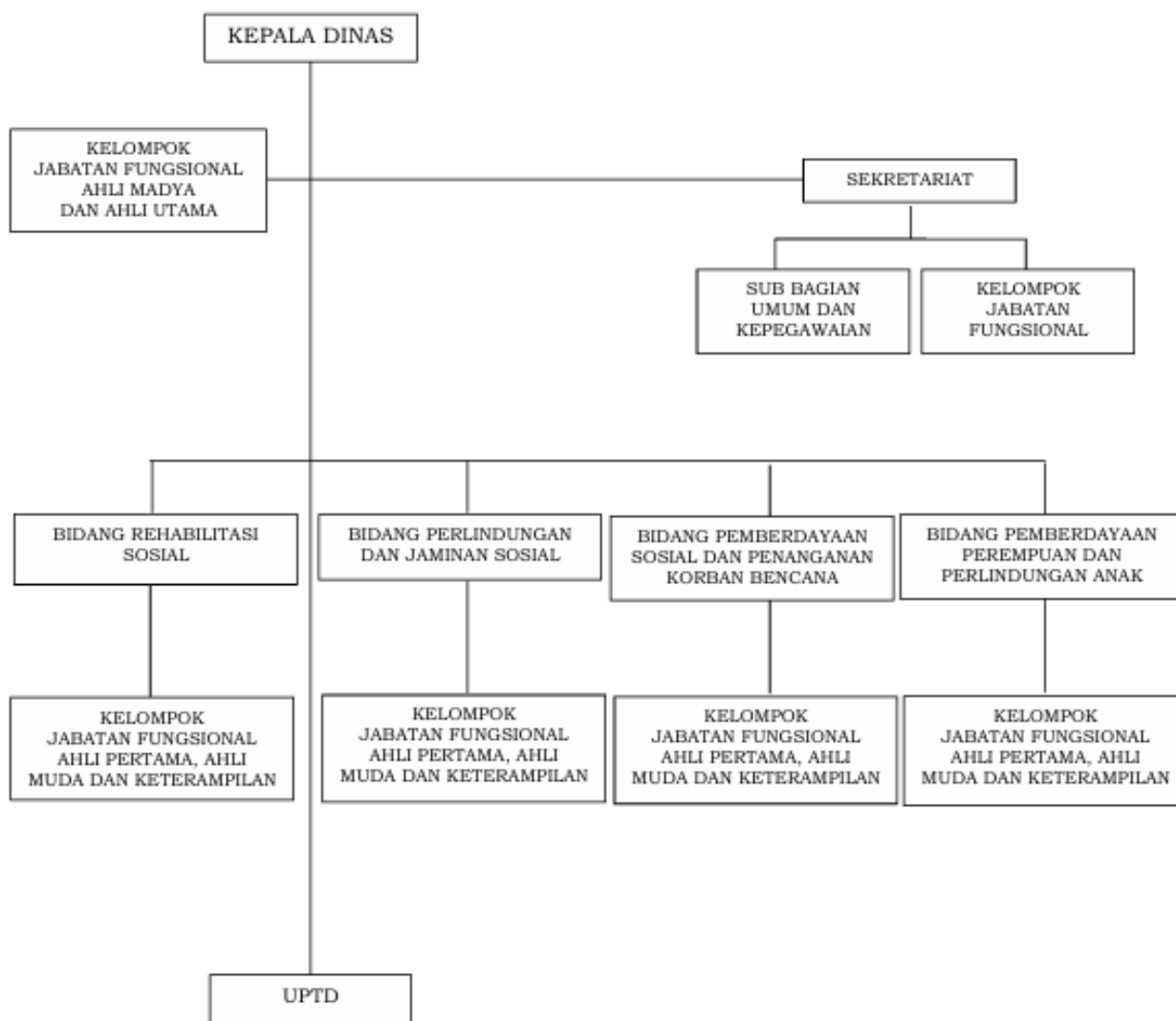
B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Bidang rehabilitasi sosial;
- d. Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan korban bencana;
- f. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Kelompok jabatan fungsional; dan
- h. UPTD.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi
Dinas Sosial PPPA
Berdasarkan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2024
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja



I.3. Isu – isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka dirumuskan (berapa jumlah isu strategis) isu strategis (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yaitu :

a. **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Berdasarkan Permensos No. 08 Tahun 2012, terdapat 26 jenis PMKS, antara lain anak terlantar, balita terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, anak jalanan, lanjut usia terlantar, korban bencana, wanita rawan sosial ekonomi dan lain-lain.

b. **Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Permensos No. 08 Tahun 2012). PSKS ini antara lain: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna, Karang werda, Pekerja Sosial Masyarakat dan lain-lain

c. **Pembangunan Gender**

Pembangunan gender dapat dikatakan sebagai pembangunan manusia secara adil, dimana pembangunan tidak membedakan jenis kelamin, asal-usul daerah, ras, agama, kondisi fisik, kondisi ekonomi dan sebagainya. Gender disini tidak hanya menyangkut tentang laki-laki dan perempuan, melainkan terkait dengan kesetaraan dari berbagai elemen masyarakat, antara laki-laki dan perempuan, antara disabilitas dengan yang normal, antara miskin dengan yang mampu,

dengan penyandang masalah sosial maupun yang sejahtera, demikian seterusnya.

d. Perlindungan terhadap perempuan dan anak

Menyangkut perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, termasuk perlindungan terhadap korban kekerasan, baik anak dan perempuan yang mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik.

Pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dihadapkan pada berbagai permasalahan atau issue strategis yang menjadi dasar kebijakan pembangunan di 2 (dua) urusan tersebut, antara lain:

- a. Masih tingginya angka kemiskinan karena ketidakmampuan mengakses sumber-sumber ekonomi sebagai akibat faktor ketunaan/disabilitas
- b. Keberadaan anak terlantar, baik dari keluarga fakir miskin, dilalaikan oleh orang tuanya maupun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, termasuk penghuni panti asuhan/LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang memerlukan pelayanan dan perlindungan
- c. Tingginya tingkat kerentanan sosial keluarga sebagai akibat faktor ekonomi yang tercermin pada jumlah peserta PKH
- d. Data fakir miskin yang belum valid
- e. Seiring dengan bertambahnya angka harapan hidup, jumlah lanjut usia semakin meningkat. Sehingga memerlukan peningkatan penanganan, utamanya lanjut usia terlantar
- f. Kondisi topografi dan geograsi yang berbukit dan terletak di pesisir selatan menyebabkan Kabupaten Trenggalek rawan bencana
- g. Keberadaan 5 jenis PMKS jalanan yang terdiri dari: pengemis, anak jalanan, wanita tuna susila (termasuk eks WTS), gelandangan dan penderita psikotik
- h. Masih banyak jumlah korban pasung, penderita psikotik dan penyandang disabilitas yang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial

- i. Semakin berkurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha terhadap usaha kesejahteraan sosial, serta terbatasnya kapasitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- j. Semakin berkurangnya penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial pada masyarakat.
- k. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender
- l. Masih rendahnya Indeks Ketimpangan Gender
- m. Lembaga Pengarusutamaan Gender belum aktif
- n. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
- o. Masih terdapat perempuan buta huruf
- p. Belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
- q. Belum optimalnya pemenuhan hak anak

Tabel 1.4
Tabel permasalahan dan isu strategis
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan		Isu Strategis	
1.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum valid	1.	Tidak tepatnya calon penerima bantuan sosial berbasis keluarga
2.	Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.	Keterbatasan PSKS dalam penanganan PPKS
3.	Belum optimalnya penanganan rehabilitasi sosial PMKS	3.	Keterbatasan kapasitas layanan lembaga rehabilitasi sosial
4.	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengarusutamaan gender	4.	Pelibatan masyarakat dalam program lintas sektor yang mendukung

I.4. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

I.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan

isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”

Yang dijabarkan sebagai berikut:

- **MAJU:** Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.
- **EKONOMI INKLUSIF:** Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.
- **SDM KREATIF:** SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek.
- **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN:** Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

(environmental carrying capacity) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.

Misi

Kemudian visi tersebut diterjemahkan dalam berbagai misi, yaitu:

- 1 Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren
- 2 Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 3 Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)
- 4 Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan

Dari 4 (empat) misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek mendukung Misi ke1 dan 3 yang dilaksanakan melalui dukungan program sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap Misi ke-1: melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Kontribusi terhadap Misi ke-3: melalui Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak, Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 1
Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Sosial PPPA
Tahun 2025

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional		Nilai Reformasi Birokrasi	71,5
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,68
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,50 (AA)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	37 dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	503 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	46 Laporan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial		Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1,34%
	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	99,63 %
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	5,70 %
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100 %
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	26, 36 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	21.14 %
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	79 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan	21.14 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Keluarga
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Lembaga
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	84 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	5 orang
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	91.31 %
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1060 orang
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	565 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1.500 orang
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Orang

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 Orang

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 Dokumen
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	98.98 %
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	4 dokumen
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.500 Orang
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	151.000 Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	85.850 Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	170 Orang
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang disusun	4 dokumen
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	780 Orang
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana	80 orang
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100 %
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 unit
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73
		Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	80
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka Penilaian APE	90%
		Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	80%
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pencapaian prasyarat PUG	90 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen pelembagaan pengarusutamaan gender	84 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang dikembangkan	100 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	125 Orang
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Dokumen
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perlindungan perempuan	100 %
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	4 dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	4 dokumen
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 orang
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang didampingi untuk peningkatan kualitas keluarga	69 %
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mengalami peningkatan kualitas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	90 keluarga
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Dokumen
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pelembagaan PHA	73 %
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 dokumen
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	36 Organisasi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan perlindungan khusus anak	100 %
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak	4 dokumen
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	5 Kegiatan
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	40 orang
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	4 dokumen
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6 Layanan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4 dokumen
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	5 Kegiatan
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	20 Orang
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	6 Dokumen

II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 9 (sembilan) indikator sasaran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Trenggalek

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Formula Perhitungan	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	$(\text{Jumlah keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya} / \text{Jumlah keluarga yang terdaftar dalam DTKS}) \times 100 \%$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat	$(\text{Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat})$	Bidang Perlindungan dan Jaminan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Formula Perhitungan	Penanggung jawab
		status sosial ekonominya	meningkat status sosial ekonominya / Jumlah keluarga yang terdaftar dalam DTKS) × 100 %	Sosial
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Jumlah PPKS yang ditangani/Jumlah PPKS) × 100 %	Bidang Rehabilitasi Sosial
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	(Jumlah PSKS/ Jumlah PPKS) × 100%	Bidang Pemberdayaa n dan Pengembanga n Sosial
2.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka Penilaian APE	(Skor penilaian APE / skor maksimal APE) X 100 %	Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	(Skor KLA yang diperoleh / skor maksimal KLA) X 100 %	Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	(Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan / Jumlah keseluruhan perempuan dan anak korban kekerasan) X 100 %	Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun (n)	Sekretariat
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	skor penilaian evaluasi SAKIP / skor maksimal evaluasi SAKIP) x 100%	Sekretariat

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2025 mengalami 1 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah: dalam penentuan target sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi target untuk menyesuaikan hasil capaian dan sehingga dari beberapa target indikator tidak selaras dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

- a. Perubahan Anggaran
- b. Perubahan Target Kinerja

Tabel 2. 3
Perbandingan Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan	1.	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	99,53%	99,63%

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
	kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	2.	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	5,60%	5,70%
		3.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100%	100%
		4.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	26,26%	26,36%
2.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.	Angka Penilaian APE	90%	90%
		2.	Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	80%	80%
		3.	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%	100%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,68	99,68
		2.	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,50 (AA)	90,50 (AA)

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 setelah perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini.

II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah perubahan (Rp)	Anggaran Responsif Gender
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp.16.276.119.541	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp.15.614.786.146	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Rp.15.614.786.146	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.361.257.758	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 26.647.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.324.729.676	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 16.020.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 609.500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 255.431.350	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 6.224.030	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 431.951.200	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 305.868.532	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 334.846.050	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.349.850	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 332.496.200	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 1.860.000	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp. 1.860.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 3.038.964.683	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 2.266.704.025	ARG
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 772.260.658	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 5.271.368.175	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.271.368.175	ARG
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 548.935.450	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 222.019.450	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah perubahan (Rp)	Anggaran Responsif Gender
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 326.916.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 51.330.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 51.330.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp. 661.333.395	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp. 661.333.395	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 104.678.401	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 18.433.225	ARG
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 86.245.176	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 166.942.267	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 43.969.228	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 92.637.376	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.335.663	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 16.679.245	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.679.245	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	Rp. 56.263.100	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 56.263.100	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 316.770.382	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 59.296.671	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 210.892.624	ARG
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 46.581.087	

Tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan proses penandaan pada dokumen anggaran pemerintah untuk mengidentifikasi kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kesetaraan gender. Sebenarnya urusan Sosial serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum kegiatan mendukung langsung Responsif Gender, tetapi secara khusus dokumen kegiatan berikut yang pendanaannya mendukung responsif Gender:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp. 2.266.704.025
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 5.271.368.175
3. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 18.433.225
4. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 210.892.624

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja 2025

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 101,08% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Trenggalek**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	99,63%	-	-	-	-	99,89%	100,26%
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	5,70%	-	-	-	-	6,87%	120,50%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
	Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100%	-	-	-	-	100%	100%
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	26,36%	-	-	-	-	26,53%	100,64%
2.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka Penilaian APE	90,00%	-	-	-	-	80,10%	89,00%
		Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	80,00%	-	-	-	-	80,10%	100,13%
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%	-	-	-	-	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,68	-	-	-	-	98, 75	99,07%
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,50 (AA)	-	-	-	-	90,61 (AA)	100,12%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 5 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target;

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas indikator tercapai melebihi target

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Faktor pendorong :

Urusan Sosial

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan), perbaikan kondisi ekonomi (penurunan kemiskinan dan pengangguran), serta ketersediaan infrastruktur dan lingkungan hidup yang layak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Peningkatan pemerintah daerah dalam mengarusutamakan gender, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan serta partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik

B. Faktor kendala :

Urusan Sosial

- Keterbatasan akses terhadap layanan sosial-ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat serta keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung dari pihak terkait

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Disparitas atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan dan partisipasi yang belum optimal

III.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026
Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	98,90	98,92	98,94	99,50	99,63	99,63	98,95	98,73	99,40	99,53	99,89	99,89	100,05	99,81	100,46	100,03	100,26	100,26
	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	1,84	2,76	3,68	4,60	5,70	5,70	1,82	2,52	4,56	5,60	6,87	6,87	98,81	91,30	123,91	121,74	120,50	120,50
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	89,31	89,32	89,82	91,00	100	100	89,79	93,72	102,16	104,11	100	100	100,54	104,93	113,74	114,41	100	100
	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	21,10	21,11	21,12	25,33	26,36	26,36	21,10	21,25	25,23	26,26	26,53	26,53	100	100,66	119,46	103,67	100,64	100,64
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan	Angka Penilaian APE	82	84	86	88,00	90	90	80	75	70,5	70,50	80,10	80,10	97,56	89,29	98,68	80,11	89,00	89,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026
pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	75	77	76	80,00	80	80	75	70,14	75	70,50	80,10	80,10	100	91,09	81,98	88,13	100,13	100,13
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,01	86,01	86,02	98,26	99,68	99,68	90,88	90,94	98,16	99,68	98,75	98,75	105,66	105,73	114,11	101,45	99,07	99,07
	(Kategori Nilai) SAKIP	90,10 (AA)	90,20 (AA)	90,30 (AA)	90,40 (AA)	90,50 (AA)	90,60 (AA)	83,10 (A)	87,02 (A)	90,36 (AA)	90,36 (AA)	90,50 (AA)	90,50 (AA)	92,23	96,67	99,96	99,96	100,12	100,12

- III.2.1. Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial
- Indikator 1 :** Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya

Tabel 3. 2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026
Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	98,90	98,92	98,94	99,50	99,63	99,63	98,95	98,73	99,40	99,53	99,89	99,89	100,05	99,81	100,46	100,03	100,26	100,26

Pencapaian indikator Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya ditunjukkan pada tahun 2025 melalui penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) 68.133 KK, Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Non penerima BSP 284.914 KK, Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah 3.724 KK, Pemohon Gertak yang dibantu,

Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2.720 KK dengan total sejumlah 362.074 KK dibagi DTSEN Per Desember sejumlah sebanyak 362.486 KK atau mencapai 99,89%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- Penyaluran berbagai bantuan sosial untuk memperkuat PPKS dan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, yang menjadi landasan awal menuju kemandirian

Tantangan/kendala yang ditemui

- Ketidaktepatan Sasaran (Inclusion & Exclusion Error)

Beberapa strategi/upaya yang akan dilakukan Untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja di tahun mendatang diantaranya

- Kordinasi dengan lintas sektor terkait verifikasi dan validasi data sehingga lebih tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat yang diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial

Indikator 2 : Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya

Tabel 3. 2.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026
Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	1,84	2,76	3,68	4,60	5,70	5,70	1,82	2,52	4,56	5,60	6,87	6,87	98,81	91,30	123,91	121,74	120,50	120,50

Pencapaian indikator Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya terhitung dari Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang mengalami graduasi sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 9.446 KK dibagi jumlah Populasi PPKS cakupan daerah (DTSEN desil 1-5) sebanyak 137.523 KK atau sebesar 6,87%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- Edukasi pendamping Program Keluarga Harapan kepada penerima manfaat untuk pengelolaan dan pemberdayaan sehingga mampu keluar dari data kemiskinan atau graduasi

Tantangan/kendala yang ditemui

- Permasalahan utama terletak pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi program pemberdayaan ekonomi dengan perlindungan sosial

Beberapa strategi/upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja di tahun mendatang diantaranya :

- Mendampingi keluarga penerima manfaat yang sudah graduasi mandiri untuk membantu untuk program pemberdayaan guna kesetabilan dan peningkatan ekonomi

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial

Indikator 3 : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

Tabel 3. 2.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra
Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	89,31	89,32	89,82	91,00	100	100	89,79	93,72	102,16	104,11	100	100	100,54	104,93	113,74	114,41	100	100

Untuk mengukur Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) pada tahun 2025 berdasarkan data pelayanan rehabilitasi sosial sebanyak 3.429 orang atau terlayani sebesar 100%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- Pelayanan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan dengan maksimal atas terbentuknya shelter di Kabupaten Trenggalek dengan ini proses penanganan lebih optimal dalam hal rujukan dan penelusuran keluarga.

Tantangan/kendala yang ditemui

- Mobilitas PPKS yang cukup dinamis, baik antar desa/kecamatan maupun antar kabupaten/kota, menyebabkan perubahan domisili yang tidak dilaporkan secara administratif. Sebagian PPKS berpindah tempat karena faktor ekonomi, konflik keluarga, penelantaran, maupun urbanisasi. Akibatnya, data dalam basis data kesejahteraan sosial menjadi kurang mutakhir dan menyulitkan proses *tracking* serta pendampingan berkelanjutan serta masih ditemukan PPKS yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Beberapa strategi/upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja di tahun mendatang diantaranya :

- Strategi dalam pelayanan rehabilitasi sosial sangat dibutuhkan kerjasama dengan lintas sektor dan memperkuat jejaring dengan lembaga terkait.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial

Indikator 4 : Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tabel 3. 2.4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra
Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	21,10	21,11	21,12	25,33	26,36	26,36	21,10	21,25	25,23	26,26	26,53	26,53	100	100,66	119,46	103,67	100,64	100,64

Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam Penanganan Pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2025 sebanyak 395 orang

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- Penanganan masalah sosial sangat terbantu atas partisipasi sumber potensi seperti Karang taruna, Lembaga kesejahteraan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta segala pihak lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan Pemerintah Pusat hingga Desa/Kelurahan

Tantangan/kendala yang ditemui

- Jumlah angka kemiskinan, disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar dan sebagainya tidak sebanding dengan pertumbuhan relawan, LKS, atau pilar sosial

Beberapa strategi/upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja di tahun mendatang diantaranya :

- Peningkatan kompetensi sumber potensi kesejahteraan sosial sangat penting dilakukan guna peningkatan pengetahuan dan komunikasi agar dapat membangun jejaring

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator 1 : Angka Penilaian APE

Tabel 3. 2.5 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka Penilaian APE	82	84	86	88,00	90	90	80	75	70,5	70,50	80,10	80,10	97,56	89,29	98,68	80,11	89,00	89,00

Angka Penilaian APE adalah indikator untuk menilai penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, lembaga, dan kementerian atas komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender, Pada tahun 2025 Kabupaten Trenggalek berdasarkan perhitungan mandiri mendapatkan skor sebesar 80,10 atau dalam kategori Utama

Aktivitas yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target

- Penguatan Regulasi

- Implementasi Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab tidak tercapainya kinerja ini adalah :

- Kesetaraan gender belum dianggap prioritas strategis.
- Kebijakan responsif gender sering hanya bersifat administratif, bukan substantif.

Upaya/strategi yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan kinerja ini adalah :

- Penguatan komitmen dan tata kelola
- Penguatan Data Terpilah & Analisis Gender
- Integrasi PUG dalam Program Prioritas Daerah

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator 2 : Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)

Tabel 3. 2.6 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	75	77	76	80,00	80	80	75	70,14	75	70,50	80,10	80,10	100	91,09	81,98	88,13	100,13	100,13

Tercapainya penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan hasil dari komitmen dan kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media, serta anak itu sendiri dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Penilaian KLA dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator-indikator yang mencakup penguatan kelembagaan serta pemenuhan hak anak yang dikelompokkan dalam lima klaster, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- Keberhasilan dalam penilaian KLA ditunjukkan melalui adanya kebijakan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta program dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, tersedianya data anak yang terpilah, keterlibatan forum anak dalam proses perencanaan pembangunan

Tantangan/kendala yang ditemui

- Data terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin belum lengkap

Upaya/strategi yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan kinerja ini adalah :

- Mengevaluasi atas capaian indikator penilaian KLA dan penyiapan dokumen data dukung guna pemenuhan penilaian

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator 2 : Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan

Tabel 3. 2.6 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Adapun Jumlah data pengaduan pada Tahun 2025 sebesar 150 dan semua dapat terlayani dengan baik. Dengan persebaran jumlah 35 perempuan dan 115 anak

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- Kerjasama dengan lintas sektor dan komunikasi dengan segala pihak sebagai kunci keberhasilan dalam pelayanan kekerasan bagi perempuan dan anak

Tantangan/kendala yang ditemui

- Tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk tidak melapor
- Kurangnya pengetahuan tentang layanan yang tersedia

Upaya/strategi yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan kinerja ini adalah :

- Mengevaluasi atas capaian indikator penilaian KLA dan penyiapan dokumen data dukung guna pemenuhan penilaian

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3. 2.6 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra 2026
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,01	86,01	86,02	98,26	99,68	99,68	90,88	90,94	98,16	99,68	98,75	98,75	105,66	105,73	114,11	101,45	99,07	99,07

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM diukur dengan cara menggabungkan hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 sebesar 98,75

Aktivitas yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target

- Peningkatan Kualitas Pelayanan
- Pengelolaan Pengaduan dan Tindak Lanjut

Faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab tidak tercapainya kinerja ini adalah :

- Pelayanan melebihi standar waktu yang ditetapkan
- Budaya pelayanan yang belum berorientasi pada kepuasan masyarakat

Upaya/strategi yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan kinerja ini adalah :

- Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami
- Menetapkan dan mempublikasikan standar waktu layanan
- Menerapkan prinsip pelayanan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Indikator 1 : (Kategori Nilai) SAKIP

Tabel 3. 2.6 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Masa Periode Renstra
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	(Kategori Nilai) SAKIP	90,10 (AA)	90,20 (AA)	90,30 (AA)	90,40 (AA)	90,50 (AA)	90,60 (AA)	83,10 (A)	87,02 (A)	90,36 (AA)	90,36 (AA)	90,50 (AA)	90,50 (AA)	92,23	96,67	99,96	99,96	100,12	100,12

SAKIP merupakan tata cara mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja guna Menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapatkan kategori memuaskan (AA) atau sebesar 90,50. Hal ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan mengacu dokumen perencanaan dan diimplementasi dalam pelaksanaan kegiatan serta hasil pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel

Tantangan/kendala yang ditemui

- Hasil evaluasi Tidak berbasis outcome (masih output-oriented)

Upaya/strategi yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan kinerja ini adalah :

- Menghubungkan realisasi fisik dan keuangan dengan capaian outcome

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian dengan Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Kota Lain Lingkup Provinsi Jawa Timur	Persentase Capaian (dibandingkan dengan kota lain)
1.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	80,10 (Utama)	Utama (6 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Trenggalek berada posisi kategori (Utama)
				Nindya (14 Kabupaten/Kota)	
				Madya (18 Kabupaten/Kota)	

Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		(Kategori Nilai) SAKIP	100,12		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	Menunjang
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	94,87%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	Menunjang
	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	100,26%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	125,50%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	upaya penanganan kesejahteraan sosialMeningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial						
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	120,50%	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	126,58%	Menunjang
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan	125,50%	Menunjang
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100,64	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	119,05%	Menunjang
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	109,52%	Menunjang
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	108,87%	Menunjang
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	155,27%	Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91,23%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					berbasis keluarga		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	100%	Menunjang
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	100%	Menunjang
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang disusun	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana	87,50%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	Menunjang
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi	Angka Penilaian APE	89,00%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pencapaian prasyarat PUG	89%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	korban kekerasan terhadap perempuan dan anak						
		Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	100,13%	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen pelembagaan pengarusutamaan gender	99,20%	Menunjang
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang dikembangkan	100%	Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perlindungan perempuan	100%	Menunjang
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100%	Menunjang
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang didampingi untuk peningkatan	109,51%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					kualitas keluarga		
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mengalami peningkatan kualitas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	75,56%	Target sebesar 117 keluarga, tetapi kegiatan peningkatan kualitas keluarga dilaksanakan dgn sasaran 68 keluarga
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	Persentase pelebagaan PHA	108,24%	Menunjang
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	100%	Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan perlindungan khusus anak	100%	Menunjang
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak	100%	Menunjang
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	Jumlah laporan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Daerah Kabupaten/Kota			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100%	Menunjang

Program Prioritas Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Sepanjang periode pelaksanaan program, berbagai upaya strategis telah dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

Dari sisi cakupan penerima manfaat, program ini berhasil menjangkau mayoritas keluarga miskin dan rentan melalui skema bantuan sosial reguler maupun bantuan bersyarat. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan secara berkala guna meningkatkan akurasi sasaran dan meminimalkan potensi exclusion maupun inclusion error. Hal ini berdampak pada meningkatnya ketepatan penyaluran bantuan serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Dalam aspek jaminan sosial, kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan terus mengalami peningkatan. Kelompok pekerja informal dan rentan yang sebelumnya belum terlindungi, kini semakin terintegrasi dalam sistem perlindungan sosial nasional. Dengan demikian, risiko sosial dan ekonomi akibat sakit, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, maupun kondisi darurat lainnya dapat diminimalkan.

Selain itu, sinergi lintas sektor dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya turut mempercepat proses verifikasi, validasi, serta penyaluran bantuan. Digitalisasi sistem penyaluran dan pemanfaatan teknologi informasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Secara keseluruhan, capaian program ini tidak hanya terlihat dari meningkatnya jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan beban pengeluaran rumah tangga miskin, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan daya tahan ekonomi keluarga rentan. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Lainnya

Tujuan	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Keterangan
Meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	0,09	1,34	1,34	100%	
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,11	72,5	-	-	Realisasi belum rilis BPS
	Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	70	78	80,10	102,69%	

Penguatan data serta indentifikasi PPKS merupakan proses memperbaiki, memperbarui, dan memvalidasi data agar lebih akurat, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan serta intervensi sosial. adapun langkah sebagai berikut.

- Pemutakhiran dan integrasi data berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi) secara berkala.
- Sinkronisasi data dengan kelurahan/desa, RT/RW, dan lembaga sosial.
- Verifikasi dan validasi lapangan secara rutin.

Upaya ke depan untuk pemenuhan Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA) perlu dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. PUHA umumnya menjadi indikator dalam kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mengukur sejauh mana hak anak terpenuhi di suatu wilayah.

Berikut beberapa strategi dan upaya ke depan yang dapat dilakukan:

- Penguatan Regulasi dan Kebijakan
- Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar
- Penguatan Partisipasi Anak

III.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tahun 2025 adalah sebesar Rp.16.269.895.511 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 15.269.770.582 atau sebesar 93,85% Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.269.895.511,00	15.269.770.582,00	93,85%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.608.562.116,40	14.677.774.582,00	94,04%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.608.562.116,40	14.677.774.582,00	94,04%
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.608.562.116,40	14.677.774.582,00	94,04%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.361.257.758,40	5.739.094.365,00	90,22%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.647.500,00	24.894.000,00	93,42%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.653.750,00	23.924.000,00	93,26%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	993.750,00	970.000,00	97,61%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.324.729.676,00	4.726.093.399,00	88,76%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.295.191.876,00	4.698.680.399,00	88,73%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.080.000,00	25.974.000,00	92,50%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	728.900,00	720.000,00	98,78%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	728.900,00	719.000,00	98,64%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.020.000,00	14.367.000,00	89,68%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.020.000,00	14.367.000,00	89,68%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	609.500,00	601.000,00	98,61%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	609.500,00	601.000,00	98,61%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.431.350,00	252.142.517,00	98,71%

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.266.200,00	9.266.000,00	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.330.000,00	47.169.200,00	93,72%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	4.978.500,00	99,57%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.000.000,00	47.999.950,00	100,00%
Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	49.963.000,00	99,93%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.509.650,00	5.478.800,00	99,44%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.325.500,00	87.287.067,00	99,96%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.224.030,00	6.021.000,00	96,74%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.224.030,00	6.021.000,00	96,74%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.951.200,00	419.394.057,00	97,09%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.592.200,00	107.155.507,00	90,36%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.905.000,00	98,10%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	308.359.000,00	307.333.550,00	99,67%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.868.532,40	301.602.392,00	98,61%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.200.000,00	145.577.012,00	97,57%
Pemeliharaan Mebel	1.269.840,00	1.269.000,00	99,93%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.731.600,00	33.149.000,00	98,27%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.667.092,40	121.607.380,00	99,95%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	334.846.050,00	329.652.912,00	98,45%
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.349.850,00	2.265.000,00	96,39%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2.349.850,00	2.265.000,00	96,39%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	332.496.200,00	327.387.912,00	98,46%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9.446.100,00	9.325.000,00	98,72%

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	227.726.000,00	227.135.412,00	99,74%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.026.300,00	1.930.000,00	95,25%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	91.321.800,00	87.032.500,00	95,30%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.976.000,00	1.965.000,00	99,44%
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.860.000,00	1.190.000,00	63,98%
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.860.000,00	1.190.000,00	63,98%
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.860.000,00	1.190.000,00	63,98%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.038.964.683,00	2.782.628.607,00	91,57%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.266.704.025,00	2.223.598.670,00	98,10%
Penyediaan Permakanan	1.423.727.750,00	1.422.417.500,00	99,91%
Penyediaan Sandang	24.563.650,00	24.249.985,00	98,72%
Penyediaan Alat Bantu	83.224.200,00	82.272.250,00	98,86%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.094.200,00	17.957.988,00	89,37%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	408.788.350,00	400.733.022,00	98,03%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.397.275,00	2.240.000,00	93,44%
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	141.275,00	140.000,00	99,10%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	17.137.325,00	16.993.625,00	99,16%
Pemberian Layanan Data dan	17.850.000,00	16.640.000,00	93,22%

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pengaduan			
Pemberian Layanan Kedaruratan	259.750.000,00	231.210.000,00	89,01%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.970.000,00	4.814.000,00	96,86%
Pemberian Layanan Rujukan	4.060.000,00	3.930.300,00	96,81%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	772.260.658,00	559.029.937,00	72,39%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	852.500,00	600.000,00	70,38%
Pemberian Layanan Kedaruratan	345.000.000,00	230.000.000,00	66,67%
Penyediaan Permakanan	3.774.000,00	3.633.000,00	96,26%
Penyediaan Sandang	20.529.850,00	3.712.000,00	18,08%
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	2.570.208,00	2.476.000,00	96,33%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	67.008.000,00	37.499.029,00	55,96%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	42.937.000,00	31.192.000,00	72,65%
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	320.000,00	300.000,00	93,75%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	410.000,00	400.000,00	97,56%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	640.000,00	640.000,00	100,00%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	640.000,00	640.000,00	100,00%
Pemberian Layanan Rujukan	285.529.100,00	245.917.908,00	86,13%
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2.050.000,00	2.020.000,00	98,54%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.271.368.175,00	5.240.813.842,00	99,42%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.271.368.175,00	5.240.813.842,00	99,42%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	187.260.775,00	186.148.892,00	99,41%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	18.757.100,00	18.680.000,00	99,59%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.063.502.800,00	5.034.214.950,00	99,42%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.847.500,00	1.770.000,00	95,81%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	548.935.450,00	534.256.981,00	97,33%

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	222.019.450,00	211.955.350,00	95,47%
Penyediaan Makanan	205.001.700,00	195.327.350,00	95,28%
Penyediaan Sandang	4.467.750,00	4.328.000,00	96,87%
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.550.000,00	1.300.000,00	83,87%
Pelayanan Dukungan Psikososial	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	326.916.000,00	322.301.631,00	98,59%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	13.713.500,00	13.255.000,00	96,66%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	313.202.500,00	309.046.631,00	98,67%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	51.330.000,00	50.137.875,00	97,68%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	51.330.000,00	50.137.875,00	97,68%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	51.330.000,00	50.137.875,00	97,68%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	661.333.394,60	591.996.000,00	89,52%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	661.333.394,60	591.996.000,00	89,52%
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	661.333.394,60	591.996.000,00	89,52%
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	104.678.401,00	103.412.500,00	98,79%
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	18.433.225,00	18.049.500,00	97,92%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	8.798.900,00	8.642.500,00	98,22%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	9.634.325,00	9.407.000,00	97,64%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.245.176,00	85.363.000,00	98,98%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	4.975.400,00	4.944.000,00	99,37%

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	79.947.100,00	79.119.000,00	98,96%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.322.676,00	1.300.000,00	98,29%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	166.942.267,00	132.195.347,00	79,19%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	43.969.228,00	43.870.850,00	99,78%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	43.969.228,00	43.870.850,00	99,78%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	92.637.376,00	59.241.687,00	63,95%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	92.637.376,00	59.241.687,00	63,95%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.335.663,00	29.082.810,00	95,87%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.335.663,00	29.082.810,00	95,87%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	16.679.245,00	15.997.000,00	95,91%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.679.245,00	15.997.000,00	95,91%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4.366.200,00	4.307.000,00	98,64%
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6.729.920,00	6.575.000,00	97,70%

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.583.125,00	5.115.000,00	91,62%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	56.263.100,00	52.722.500,00	93,71%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	56.263.100,00	52.722.500,00	93,71%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.316.550,00	21.791.500,00	86,08%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.946.550,00	30.931.000,00	99,95%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	316.770.381,60	287.668.653,00	90,81%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.296.671,00	59.119.851,00	99,70%
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	1.765.899,00	1.648.000,00	93,32%
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	57.530.772,00	57.471.851,00	99,90%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	210.892.624,00	182.837.202,00	86,70%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.390.000,00	70.285.050,00	95,77%
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	137.502.624,00	112.552.152,00	81,85%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.581.086,60	45.711.600,00	98,13%
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	6.111.869,60	5.945.000,00	97,27%
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	38.684.337,00	37.986.600,00	98,20%

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	1.784.880,00	1.780.000,00	99,73%

Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	99,50 %	99,53 %	100,03%	6.054.666.670	6.007.335.776	99,22%
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	4,60 %	5,6 %	121,74%	38.075.000	37.925.000	87,50%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	91,00 %	104,11 %	114,41%	3.221.671.061	2.854.609.254	88,61%
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	25, 33 %	26,26 %	103,67 %	408.443.539	396.998.464	97,20%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka Penilaian APE	88,00%	70,50 %	80,11%	294.720.032	292.264.260	99,17%
		Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	80,00%	70,50 %	88,13 %	100.000.000	99.468.000	96,03%
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%	100 %	100 %	379.428.730	362.117.754	95,44%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,26	99, 68	101,45 %	4.462.320.596	4.453.156.264	99,79
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,40 (AA)	90,36 %	99,96 %	1.261.264.880	1.229.264.708	97,46%

Tabel 3. 7 Efisiensi Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran				Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Rata-rata presentase Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-rata presentase Capaian	
1.	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	99,63 %	99,89 %	100,26%	105,35%	5.250.763.575	5.220.363.842	99,42%	97,36%	1,08 (efisien)
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	5,70%	6,87%	120,50%		20.604.600	20.450.000	99,25%		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100%	100%	100%		3.589.760.133	3.318.075.588	92,43%		
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	26,36%	26,53%	100,64%		386.176.050	379.790.787	98,35%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran				Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Rata-rata presentase Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-rata presentase Capaian	
2.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka Penilaian APE	90,00%	80,10%	89,00%	96,38%	294.720.032	292.264.260	99,17%	96,88%	1,04 (Efisien)
		Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	80,00%	80,10%	100,13%		100.000.000	99.468.000	96,03%		
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%		379.428.730	362.117.754	95,44%		
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,68	98,75	99,07%	99,60%	4.462.320.596	4.453.156.264	99,79	98,63%	1,07 (Efisien)
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,50 (AA)	90,61 (AA)	100,12 %		1.261.264.880	1.229.264.708	97,46%		

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selaku pelayan masyarakat, utamanya dalam bidang urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilaksanakan melalui kegiatan masing-masing bidang kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sebagai kesimpulan bahwa pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2025 secara umum telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan termasuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal kegiatan, prosedur sesuai ketentuan, jumlah sasaran termasuk indikator kinerja dilaksanakan sesuai rencana. Sehingga, secara umum dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan pada urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek efektif dan efisien serta akuntabel.

Berbagai upaya atau langkah di masa mendatang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah, antara lain dengan:

- Pelaksanaan pembangunan pada urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memerlukan dukungan anggaran dari APBN dan APBD Provinsi
- Sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan masing-masing unit kerja dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yang diawali dengan pendataan, perencanaan, diikuti pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan acuan dalam perumusan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik terutama bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Trenggalek;

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

NO	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL TINDAKLANJUT REKOMENDASI			KETERANGAN
			TS	TB	BT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Agar target jangka menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, dengan melampirkan breakdown target kinerja jangka menengah ke dalam target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur, pihak yg bertanggungjawab agar melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik, agar dilengkapi dg mekanisme atau SOP tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik, dokumentasi monitoring capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja, serta tindak lanjut atas hasil monitoring kerja.	Target dan capaian kinerja periode renstra 2021-2025 tertuang pada Renstra 2025-2029 sebagai monitoring capaian kinerja. Target renstra tahun berjalan tertuang pada renja dan dilakukan pelaporan setiap tribulan. Indikator kinerja tertuang pada Perjanjian Kinerja dan dilaporkan pada LKjIP Penyusunan SOP monitoring Renstra secara periodik.	V			https://drive.google.com/drive/folders/1XFpJ-rbo0nAerzuon3oiaDusWVS0ltrS?usp=sharing

NO	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL TINDAKLANJUT REKOMENDASI			KETERANGAN
			TS	TB	BT	
1	2	3	4	5	6	7
2	Dalam pengukuran kinerja agar melampirkan hasil evaluasi kinerja semester I tahun 2025 yang mempengaruhi/ dimanfaatkan untuk penyesuaian (refocusing) organisasi serta bukti tindaklanjut hasil pengukuran capaian kinerja tersebut.	Hasil evaluasi kinerja menjadi acuan dalam penyesuaian organisasi yang dilaksanakan setiap tribulan melalui dialog kinerja dan pengukuran capaian kinerja melalui evaluasi renja tribulanan.	V			https://drive.google.com/drive/folders/107u-yfBRNgcliEAPVt_vdQOl4gosXs5j?usp=drive_link
3	Agar melampirkan dokumentasi evaluasi kinerja secara tribulan/ semester/ tahunan yang berpengaruh pada budaya kinerja organisasi.	Dialog kinerja setiap tribulan merupakan bentuk evaluasi kinerja secara berkala yang dilakukan pada perangkat daerah	V			https://drive.google.com/drive/folders/1ylj9lQNVXjFrHydD5EGQgP3aKo-OZ2Ai?usp=sharing
4	Agar melampirkan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas dengan dibuktikan telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja (kondisi yang menggambarkan sebelum dan sesudah pemanfaatan hasil evaluasi)	LHE SAKIP Tahun 2024 dan Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP	V			https://drive.google.com/drive/folders/1PkIp6nlzqkgeE8MzV1YjbODHvbhd mV5g?usp=drive_link
5	Agar menyusun rencana aksi atas catatan evaluasi dari Menpan RB semester 1 tahun 2025	Tindak lanjut atas evaluasi dari Menpan RB	V			https://drive.google.com/drive/folders/17LVD12iBTN15gYe28H_yG6Wrl5bRv_Ql?usp=sharing

NO	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL TINDAKLANJUT REKOMENDASI			KETERANGAN
			TS	TB	BT	
1	2	3	4	5	6	7
	a Tujuan “Meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial” kurang cukup hanya diukur dengan “Persentase Penanganan PPKS”. Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan diukur dengan apa?	Tindak lanjut atas saran terkait "peningkatan kesejahteraan sosial" tertuang pada periode Renstra 2025-2029	V			https://drive.google.com/file/d/1S_d5mPCkyjx6UWznNeuJxc8uSqJidBn8/view?usp=sharing
	b Apakah memang Dinas Sosial P3A salah satu outcome tertingginya “Meningkat nya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi PSKS dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial”	Pada Renstra 2021-2026 Pengukuran “Meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial” terbreakdown dalam indikator sasaran strategis diantaranya 1.Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya 2.Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya 3.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani				
	c Fokus urusan Sosial harusnya mengintervensi terkait peningkatan kesejahteraan sosial					

NO	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL TINDAKLANJUT REKOMENDASI			KETERANGAN
			TS	TB	BT	
1	2	3	4	5	6	7
	d Fokus urusan P3A mengintervensi Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
	e Identifikasi IKU mohon difokuskan sesuai pada rumusan Kinerja Utama dari Dinas Sosial P3A, terutama yang terkait kondisi kesejahteraan sosial	Indikator Kinerja Utama (IKU) "Kesejahteraan Sosial" sudah disesuaikan pada periode Renstra 2025-2029 Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan dan keadilan gender)	V			https://drive.google.com/file/d/1077YJgneUXl3qXbu5Gj5KYWaKuskCy4A/view?usp=drive_link
	f Beberapa indikator kurang tepat digunakan untuk mengukur kinerja Sasaran, misalnya Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status ekonominya, persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	Penyesuaian sasaran telah ditindaklanjuti di dalam Renstra 2025-2029 1. Meningkatkan layanan PPKS 2.Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	V			https://drive.google.com/file/d/1VPVIs_tHrEeeorfyldRMaM03v8DrrBxf/view?usp=sharing
	g Sasaran nomor 2 seharusnya tidak perlu ada kalimat yang mengawal pelayanan terpadu bagi korban kekerasan. Kinerja					

NO	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL TINDAKLANJUT REKOMENDASI			KETERANGAN
			TS	TB	BT	
1	2	3	4	5	6	7
	ini terlalu kecil apabila dikawal oleh Kepala Dinas					
	h Beberapa target PK 2025 sama dengan target PK 2024, padahal realisasi 2024 sudah tercapai.	Penyesuaian Target Perjanjian Kinerja akan disesuaikan pada tahap Perubahan Perjanjian Kinerja 2025	V			https://drive.google.com/file/d/1wwL3OyBB1ckPpIZbfCV0oXl3U3dMhBpP/view?usp=drive_link
	i Penjelasan Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama dan upaya yang akan dilakukan masih sangat kurang kualitasnya. Perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam, terutama untuk target yang realisasinya tidak tercapai	Penjelasan atas keberhasilan/kegagalan akan di analisis lebih mendalam akan ditindaklanjuti pada LKJIP	V			https://drive.google.com/file/d/1DTD5NNdyecIZfYxVcPhkfQSpHiw9wN/view?usp=drive_link
	j Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran perlu ditingkatkan kualitasnya. Karena hanya ditampilkan terkait	Analisis program/kegiatan tertera pada LKJIP 2024 pada tabel 3.4, sedangkan analisis penyerapan anggaran tertera pada tabel 3.5	V			https://drive.google.com/file/d/1KVvjD3Eeb6DQGPdgyllnBtBO9OI5RdoAr/view?usp=sharing

NO	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL TINDAKLANJUT REKOMENDASI			KETERANGAN
			TS	TB	BT	
1	2	3	4	5	6	7
	penyerapan anggaran dari tiap program. Tambahkan penjelasan khususnya untuk program-program prioritas dari Dinas Sosial PPPA					

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dapat disusun dengan baik, dengan harapan semoga berguna dalam pengembangan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial selanjutnya.

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK



Drs. TOTOK RUDIJANTO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19660220 198602 1 003